

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya jika saling tolong menolong antarsesama manusia. Tolong menolong dalam bentuk apapun bisa dilakukan baik dengan harta atau dengan tenaga (jasa). Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan dengan cara memberikan pinjaman baik berupa benda maupun harta (uang) kepada orang yang membutuhkan. Perbuatan tersebut baik dan terpuji bahkan dalam Islam tindakan seperti itu bisa memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Dan dengan saling memberi bantuan seperti hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Namun dalam hal memberikan pinjaman tergantung pada niat dari orang yang memberikannya. Berbeda-beda alasan dan tujuan orang dalam memberikan pinjamannya, terutama dalam meminjamkan berupa uang. Ada orang yang memberikan pinjaman atas dasar ketaatan dan kewajibannya kepada Allah Swt dan ada pula orang yang memberikan pinjaman hanya untuk mencari keuntungannya. Pada dasarnya memberi pinjaman baik berupa benda ataupun uang itu diperbolehkan dalam islam selama pinjaman tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan finansial kepada masyarakatnya salah satunya ialah koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan *nonbank* yang bertujuan membantu kehidupan masyarakat yang berazaskan kekeluargaan

sehingga koperasi ini selain bisa bermanfaat juga bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan para anggotanya dan ini menunjukkan bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar prikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.¹ Koperasi ini didirikan dengan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup anggota dan masyarakatnya. Dan dari segi manfaat, koperasi mampu memberikan keuntungan kepada para anggotanya, membuka lapangan kerja bagi calon karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk sarana ibadah, sekolah dan sebagainya, maka ini jelas bahwa koperasi tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan.² Tetapi koperasi tersebut baik apabila tidak ada riba yang tidak sesuai dengan syariat islam, karena pada umumnya koperasi yang bukan syariah selalu menggunakan biasa jasa atau bunga dalam setiap pinjamannya sehingga menguntungkan bagi pihak koperasi.

Berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2012 pasal 83 menjelaskan bahwa koperasi terbagi menjadi empat jenis yaitu:³

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Jasa
4. Koperasi Simpan Pinjam

¹Pandji Aronaga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997), hlm. 1.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), hlm. 297.

³Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, hlm.23.

Koperasi sudah dikenal lama oleh masyarakat, bahkan hingga sekarang pun koperasi masih tetap ada di masyarakat. Koperasi pun ada yang berbadan hukum adapula yang tidak. Jika koperasi yang berbadan hukum maka ada campur tangan pemerintah dalam kegiatannya dan tentunya harus patuh terhadap Undang-undang koperasi itu sendiri seperti dalam Undang-undang No 17 tahun 2012. Namun ada juga koperasi yang tidak berbadan hukum, yang peraturannya sendiri dibuat oleh para pengurus dan anggotanya. Seperti halnya Koperasi Karya Mekar yang ada di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tepatnya di kampung pengkolan Rt.03 Rw. 09, koperasi tersebut masih aktif dan sudah berjalan sekitar 28 tahun, namun belum berbadan hukum dan tidak terdaftar di Dinas Perkoperasian. Koperasi merupakan badan hukum, yang artinya bahwa koperasi tersebut berjalan dengan segala peraturan yang ada dan ditentukan oleh Pemerintah. Setiap perorangan atau badan hukum yang akan mendirikan koperasi maka hendaknya tercatat dan terdaftar di Dinas Perkoperasian. Namun jika koperasi tersebut berdiri tanpa diketahui pemerintah atau tidak di daftarkan ke Dinas Perkoperasian, maka koperasi tersebut ilegal. Begitu pula dengan Koperasi Karya Mekar yang didirikan selama hampir 28 tahun namun tidak terdaftar di Dinas Perkoperasian.

Akan tetapi kehadiran koperasi tersebut memiliki dampak positif bagi para anggotanya. Dalam pelaksanaanya koperasi tersebut hanya menjalankan kegiatan berupa menghimpun dana (simpanan) dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Dilihat dari kegiatannya maka Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar ini termasuk kedalam jenis koperasi simpan pinjam.

Dalam pelaksanaanya ada dua produk dalam Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar yang di jalankan yaitu simpan dan pinjam, adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Simpan

Masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar bisa menyimpan uangnya serta tidak ada batasan jumlah uang yang ingin mereka simpan dan simpanan tersebut bisa diambil kapan saja tergantung para anggotanya.

2. Pinjam

Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar ini ada batasan jumlah uang yang akan dipinjam oleh anggotanya yakni sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00. Para anggota berhak meminjam uang kepada koperasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebelum anggota mengajukan pinjaman, pengurus koperasi akan menanyakan terlebih dahulu tujuan dari pinjaman tersebut. Setelah itu peminjam akan diberitahukan bahwa ketika hendak meminjam maka dirinya harus membayar jasa sebesar 2% perbulannya di hitung dari besarnya jumlah uang yang di pinjam dan batas waktu pembayaran sampai dengan 10 bulan. Contohnya pa Amin meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 besarnya jasa ialah 2% perbulan, batas waktu pinjaman 10 bulan. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 1.000.000,00 \times 2\%$$

$$= 20.000,00 \text{ (besarnya jasa yang dibayarkan setiap bulannya)}$$

Kemudian biaya jasa tersebut dibayarkan selama 10 bulan maka jumlah adalah $20.000,00 \times 10 = 200.000,00$

Jadi, uang sebesar Rp.200.000,00 ini adalah uang tambahan yang dikenakan oleh peminjam. Dan pada akhirnya peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp1.200.000,00 yang di cicil selam 10 bulan.

Adapun angsuran tiap bulannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } \frac{1.000.000,00}{10 \text{ bulan}} + \text{jumlah jasa perbulannya} \\ & = 100.000,00 + 20.000,00 = 120.000,00 \end{aligned}$$

Maka jumlah angsuran tiap bulannya ialah sebesar Rp. 120.000,00.⁴ Dan besarnya tambahan ini tergantung daripada besarnya jumlah uang yang di pinjam.

Meminjam uang dalam islam itu diperbolehkan selama tidak ada tambahan (uang) yang disyaratkan pada awal akad dalam pinjaman tersebut. Seperti meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 maka uang yang dikembalikannya juga harus sebesar Rp1.000.000,00. Namun jika yang dipinjam sebesar Rp1000.000,00 dan dalam pengembaliannya Rp1.500.000,00 maka pinjaman tersebut dilarang dalam hukum Islam karena ada tambahan terhadap jumlah nominalnya. Selama tambahan tersebut tidak disyaratkan dan tidak diperjanjikan di awal akad, melainkan tambahan tersebut diberikan oleh peminjam atas dasar keikhlasan sebagai wujud tanda terimakasih dan pemberian yang seperti itu disebut juga dengan *iwadh* (imbalan), maka yang seperti itu boleh dan tidak dilarang.

Selama Koperasi Karya Mekar berjalan, tidak ada keluhan satupun dari pihak anggota terkait dengan proses peminjam di koperasi tersebut bahkan para anggotanya menganggap bahwa mereka terbantu dengan adanya koperasi. Mereka

⁴Hasil Wawancara dengan Pak Rifki Suherli Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar 13 Maret 2018

menganggap bahwa selain prosesnya mudah dan biaya jasanya sebesar 2% terbilang sangat kecil dibandingkan dengan biaya jasa atau Bunga yang diberikan oleh bank-bank lain, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik serta tidak memberatkan bagi para anggota yang meminjam. Beranekaragam tujuan para anggota koperasi yang meminjam uang guna memenuhi kebutuhannya, ada yang meminjam uang hanya untuk membeli motor, membeli TV, membeli tanah, memperbaiki rumah, membangun saung, untuk modal berdagang, untuk keperluan sekolah, dan untuk keperluan sehari-hari. Dilihat dari sudut pandang penulis, Koperasi Karya Mekar mendatangkan kebaikan serta memiliki dampak yang besar bagi perkenomian masyarakat setempat, salah satunya dengan cara memberikan pinjaman yang dapat digunakan anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

B. Rumusan Masalah

Meskipun Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar ini belum berbadan hukum, namun dalam kegiatannya selalu memberikan manfaat bagi anggotanya. Terlebih lagi dalam pelaksanaan pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar ini, para anggota koperasi boleh meminjam uang di koperasi nilai tersebut dan harus membayar biaya jasa sebesar 2% dari besarnya jumlah pinjaman dan dibayarkan selama 10 bulan. Dan pada akhirnya dalam pelunasan pinjaman tersebut akan melebihi pinjaman pokok yang telah dipinjam. Namun pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Karya Mekar ini memiliki banyak dampak baik bagi masyarakat terutama dari segi perekonomian khususnya dalam

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (anggotanya). Jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah, maka proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar ini mendatangkan kemaslahatan bagi para anggotanya akan tetapi ada unsur riba *Qardh* di dalamnya sehingga hal tersebut tidak sesuai syariat islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pinjam Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pinjam Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

D. Manfaat penelitian

Hasil dari tulisan ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis ataupun praktis kepada pihak-pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi terutama perihal pinjam meminjam di koperasi.
- b. Bagi masyarakat, karena penelitian ini di dapat dari hasil lapangan maka penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat serta bisa memberi pengetahuan kepada mereka tentang praktik pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat islam dan bisa lebih tahu mengenai pinjam meminjam yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta bisa sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan kepada masyarakat di Desa Panyadap dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitriani dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), menyatakan bahwa petani yang meminjam uang kepada pedagang bibit, yang dalam pelaksanaannya petani yang meminjam harus menjual bibit yang dihasilkannya kepada pedagang sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Sedangkan dalam pembayarannya petani yang meminjam harus menjual semua bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan pinjaman, dan biasanya dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh pedagang tersebut dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang.⁵

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang pinjam-meminjam uang. Sedangkan perbedaannya ialah penulis meneliti tentang pelaksanaan simpan pinjam di koperasi yang terbukti bahwa kegiatannya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaan simpan pinjamnya terdapat riba. Berbeda dengan skripsi yang dibuat oleh Laila Fitriani yang lebih fokus terhadap pinjam meminjam uang yang disertai syarat penjualan hasil panen kepada pedagang (pemberi pinjaman).

⁵Laila Fitriani, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), hlm. i.

Kamaludin dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada koperasi Pasantren Darul Muttaqien Parung Bogor) yang menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien memiliki usaha yang salah satunya adalah simpan pinjam dengan jasa pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 3% dan diperuntukan bagi masyarakat pokok dan masyarakat sekitar pondok, jenis pinjaman yang diberikan hanya terbatas pada pinjaman produktif saja yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya konsumtif. Dan dalam praktiknya simpan pinjam yang dijalankan koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien ini belum sesuai dengan hukum Islam karena di dalam praktiknya masih terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan.⁶

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang di buat penulis ini sama-sama membahas tentang simpan pinjam pada koperasi serta membahas perihal riba. Sedangkan perbedaanya adalah skripsi penulis meneliti simpan pinjam di koperasi yang belum berbadan hukum sedangkan skripsi yang di buat oleh Kamaludin yaitu koperasi yang sudah berbadan hukum syariah yang ada di wilayah pondok pesantren.

Skripsi yang di tulis oleh Erna yang berjudul Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-undang No.17 Tahun 2012 (studi di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar Jeneponto) menjelaskan bahwa dalam fikih muamalah, simpan pinjam atau hutang piutang adalah suatu aktivitas yang tidak

⁶Kamaludin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus Pasantren Darul Muttaqien Parung Bogor), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 68.

dilarang dalam Islam, dengan kata lain Islam memperbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut namun dengan syarat bahwa pihak peminjam diwajibkan untuk membayar sesuai dengan perjanjian dan melunasinya tepat waktu. Adapun pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum Islam jika terjadi sebuah akad dan dari kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau terdzalimi, maka hal tersebut hukumnya mubah. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi dan penambahan bunga pada saat peminjaman adalah sah dan boleh dilakukan dalam perkoperasian dengan alasan bahwa dari uang administrasi dan bunga yang diambil dari peminjaman tersebut akan dibagi kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.⁷

Adapun persamaan dengan penelitian penulis ini ialah terletak pada substansinya yang sama, yaitu sama-sama mengkaji tentang simpan pinjam dalam koperasi. Dan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian penulis yang ditelaahnya lebih kepada aspek muamalahnya, baik itu pada akadnya bahkan sampai kepada membahas tentang riba.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Laila Fitriani	Pelaksanaan pinjam meminjam	Dalam topik pembahasannya	Lebih fokus terhadap pinjam

⁷Erna, Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-undang No.17 Tahun 2012 (studi di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar Jeneponto), (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm.xix.

		uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)	yaitu sama-sama membahas tentang pinjam-meminjam uang	meminjam uang yang disertai syarat penjualan hasil panen kepada pedagang (pemberi pinjaman) dan bukan pada badan koperasi
2	Kamaludin	Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada koperasi Pasantren Darul Muttaqien Parung Bogor)	Sama-sama membahas tentang pinjam-meminjam di koperasi serta membahas perihal riba.	Koperasinya sudah berbadan hukum syariah dan berada di wilayah pondok pesantren.
3	Erna	Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih	Pada substansinya sama-sama	Lebih fokus terhadap pengambilan

		Muamalah dan Undang-undang No.17 Tahun 2012 (studi di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar Jeneponto)	mengkaji tentang pinjam- meminjam di koperasi beserta tinjauan Muamalahnya	uang administrasi dan penambahan bunga dalam koperasi
--	--	---	---	---

F. Kerangka Pemikiran

1. Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan yang bersama diantara para anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.⁸ Sedangkan Rudianto menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.⁹ Berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2012 pasal 83 menjelaskan bahwa koperasi terbagi menjadi empat jenis yaitu: Koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam.¹⁰ Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumen

⁸Koerman, *Manajemen Koperasi Terapan Serial Praktis Pengetahuan Dasar Koperasi*, (Surabaya: Prestasi Pustakarya, 2002), hlm. 34-35.

⁹Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 3.

¹⁰Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, hlm.23-24.

Koperasi konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan *non-Anggota*.

c. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan *non-Anggota*.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2. Pinjam-meminjam (*Qardh*)

Menurut Rahmat Syafei, secara etimologi *Qarad* berarti *al-qath'u* (potongan), harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* dan dinamakan *Qarad* karena merupakan potongan dari harta *muqrid*.¹¹ *Qardh* (utang-piutang) secara istilah adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹² Dalam pengertian lain, *al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

¹²Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 153.

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹³ Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama.¹⁴

Menurut Dr. Yadi Janwari, ada empat prinsip dalam *muamalah*, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Pada asalnya *muamalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil'ala al-tahrim*);
- b. *Muamalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*);
- c. *Muamalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat*(*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*); dan
- d. Dalam *muamalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara*.

Setiap bentuk *muamalah* akan bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak menimbulkan kemafsadatan dan kedzaliman, jika dalam kegiatan *muamalah* harus memiliki asas-asas *muamalah*. Adapun asas-asas tersebut adalah:¹⁶

¹³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.70.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

¹⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131.

¹⁶ Juhaya S Paraja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113.

- a. Asas *tabadul manafi*, yaitu suatu kegiatan muamalah yang harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
 - b. Asas pemerataan, adalah suatu prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh orang tertentu saja, akan tetapi harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin;
 - c. Asas-asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah yang dimana didalamnya terdapat kerelaan di masing-masing pihak;
 - d. Asas *adamul gharar*, yaitu setiap bentuk muamalah tidak boleh ada ketidakjelasan baik dalam timbangan, kualitas barang, kuantitas barang, serta tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan;
 - e. Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan kepada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran bentuk manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia;
 - f. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat.
-

Beberapa hal lain juga yang harus diperhatikan dalam bertansaksi muamalah yaitu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan oleh syariat Islam seperti *Maysir*, *Gharar*, *Riba*. Dari ketiga larangan tersebut, faktor riba yang akan dibahas dalam penelitian ini.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni dalam penelitian ini mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan sistem serta pelaksanaan pinjam meminjam di Koperasi simpan pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada keadaan yang nyata dilapangan mengenai suatu obyek tertentu. Dan Penelitian ini merupakan penelitian hasil dari lapangan yang bermaksud mempelajari secara

¹⁷Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaerya. 2006), hlm. 4.

intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu dan kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan.¹⁹ Pada sumber data primer ini di dapat dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang di dapat langsung dari narasumbernya, baik dengan cara berhadapan langsung maupun tidak berhadapan langsung atau bisa juga dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.²⁰ Dan data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pak Rifki Suherli selaku Pimpinan Koperasi Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder di dapat adalah cara studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 128.

²⁰Muhtadi dkk, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2003), hlm. 167

- a. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
- b. Studi kepustakaan, yakni teknik yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mendalami berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat mendukung dan melengkapi penelitian.

5. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai data yang telah didapat dari berbagai sumber
- b. Mengklasifikasikan data tersebut serta menyusunnya sesuai dengan kebutuhan penelitian
- c. Menganalisis data dengan menggabungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada
- d. Membuat kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari data dengan teori.